

**PERCEPTION OF PPKN STUDENTS UNIVERSITAS RIAU
TOWARDS THE REPUBLIC OF INDONESIA GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 21 OF 2020 CONCERNING LARGE-SCALE
SOCIAL RESTRICTIONS IN THE CONTEXT OF ACCELERATING
HANDLING OF CORONA VIRUS
DISEASE (COVID-19)**

Maulina Oktriananda¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

Email: maulinaoktriananda@yahoo.co.id¹, linda_sri70@yahoo.com², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
Phone Number: 085365918959

Pancasila and Civics Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Universitas Riau

***Abstract:** This research is motivated by the issuance a Republic of Indonesia Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease (COVID-19). The formulation of the problems in this research is how perception of PPKn students Universitas Riau towards the Republic of Indonesia Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease (COVID-19). The purpose of this research is to find out perception of PPKn students Universitas Riau towards the Republic of Indonesia Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease (COVID-19). The research method is descriptive quantitative. Based on the result of the research, it is found that the result of the calculation of respondents who answered “Agree” amounted to 71.5% where this range is in “Good” with a presence of 66.67% – 100%. Perception of PPKn students Universitas Riau towards the Republic of Indonesia Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease (COVID-19) are “Good”.*

Key Words: Perception, Students, Government Regulation, PSBB

**PERSEPSI MAHASISWA PPKN UNIVERSITAS RIAU TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21
TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Maulina Oktriananda¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

Email: maulinaoktriananda@yahoo.co.id¹, linda_sri70@yahoo.com², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
No HP: 085365918959

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Adapun metode penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif*. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa hasil perhitungan responden yang menjawab “Setuju” berjumlah 71.5% dimana rentang ini berada pada kategori “Baik” dengan keberadaan pada rentang 66.67% - 100%. Dengan demikian Persepsi Mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah Baik.

Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Peraturan Pemerintah, PSBB

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Corona Virus Disease* (COVID-19). Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember 2019 (PDPI dalam Yuliana, 2020). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya (WHO Report dalam Aditya Susilo dkk, 2020).

Corona Virus Disease (COVID-19) pun telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah menyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Negara-negara di seluruh dunia harus merespon, mencegah serta menangani Pandemi Virus COVID-19. Pemerintah Indonesia menjawab salahsatunya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Permenkes RI No. 9 Tahun 2020).

Tentunya dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) menimbulkan banyak persepsi bagi semua masyarakat terutama mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka di rumuskanlah masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana Persepsi Mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kampus PPKn Universitas Riau. Adapun yang menjadi populasi adalah mahasiswa aktif PPKn Universitas Riau dengan jumlah 273 orang (Sistem Informasi Akademik), maka penulis mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).

Salah satu cara untuk melengkapi penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan nantinya dapat mendukung keberhasilan penelitian. Usaha dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yakni kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

Dalam menganalisis data deskriptif kuantitatif menggunakan perhitungan sebagai berikut: $P = \frac{f}{n} \times 100\%$ (Anas Sudijono, 2012)

Hasil analisis dikelompokkan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan kesimpulan. Adapun tolak ukur berpedoman pada modifikasi pendapat Masri Singarimbun (1989) yaitu: Apabila responden menjawab Setuju (S) berada pada rentang 66.67% - 100% = Baik, Apabila responden menjawab Setuju (S) pada rentang 33.34% - 66.66% = Cukup Baik, Apabila responden menjawab Setuju (S) pada rentang 00.00% - 33.33% = Tidak Baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai Persepsi Mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), adapun hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Persepsi Mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

INDIKATOR		JAWABAN RESPONDEN							
Indikator 1: Pasal 1									
No.	Sub Indikator	Setuju		Cukup Setuju		Kurang Setuju/Lainnya		Missing Data	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Tidak adanya kebijakan <i>lockdown</i> atau isolasi penuh	72	72	1	1	27	27	0	0
2	PSBB dapat menekan penyebaran COVID-19	91	91	6	6	3	3	0	0
Indikator 2: Pasal 2									
1	PSBB berlaku jika mendapat persetujuan Menteri Kesehatan	65	65	9	9	26	26	0	0
2	PSBB dapat meminimalisasi mobilitas penduduk	73	73	23	23	4	4	0	0
3	PSBB sesuai dengan kultur dan karakter negara Indonesia	47	47	37	37	16	16	0	0
4	PSBB merupakan pilihan rasional untuk percepatan penanganan COVID-19	70	70	20	20	10	10	0	0
5	PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan	96	96	3	3	1	1	0	0

Indikator 3: Pasal 3									
1	Kriteria pemberlakuan PSBB harus berdasarkan jumlah kasus	76	76	7	7	17	17	0	0
2	Pemberlakuan PSBB hanya di zona merah	74	74	4	4	22	22	0	0
3	PSBB tidak bersifat menyeluruh	50	50	10	10	40	40	0	0
Indikator 4: Pasal 4									
1	Adanya pembelajaran online (metode daring)	89	89	5	5	6	6	0	0
2	Penerapan <i>work from home</i>	82	82	8	8	10	10	0	0
3	Adanya pembatasan hak individual	47	47	18	18	35	35	0	0
4	Adanya penghentian interaksi sosial	78	78	9	9	13	13	0	0
5	Penutupan tempat tempat perbelanjaan (mall)	98	98	1	1	1	1	0	0
6	PSBB dapat membatasi frekuensi dan jumlah pertemuan massal	89	89	8	8	3	3	0	0
Indikator 5: Pasal 5									
1	Setiap pemimpin daerah harus mengikuti kebijakan pusat dan tidak membuat aturan berbeda	72	72	10	10	18	18	0	0
2	PSBB perlu adanya kerjasama berbagai pihak	100	100	0	0	0	0	0	0
Indikator 6: Pasal 6									
1	Pengusulan PSBB terstruktur dan Sistematis	95	95	4	4	1	1	0	0
2	Menteri menetapkan dengan memerhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)</i>	90	90	9	9	1	1	0	0
Indikator 7: Pasal 7									
1	PSBB bersifat imbauan	9	9	12	12	79	79	0	0
2	PSBB tidak memuat sanksi	10	10	3	3	87	87	0	0
	Jumlah	1573	1573	207	207	420	420	0	0
	Rata-rata	71.5	71.5	9.41	9.41	19.09	19.09	0	0

(Sumber: Data Olahan 2020)

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian yang telah dipapar diatas, dengan jumlah responden 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau, tentang persepsi mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator 1

1. Tidak Ada Kebijakan *Lockdown* atau Isolasi Penuh

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarkan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap tidak ada kebijakan

lockdown atau isolasi penuh. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 27% berada pada rentang 00.00% - 33.33% berada pada tingkat “Tidak Baik”. Hal ini dikarenakan Indonesia seharusnya melaksanakan kebijakan *lockdown* atau isolasi penuh karena *lockdown* adalah kunci yang tepat dalam pemutusan penyebaran COVID-19.

2. PSBB Dapat Menekan Penyebaran COVID-19

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap PSBB dapat menekan penyebaran COVID-19. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 91% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan PSBB memberikan pengaruh dalam angka penyebaran COVID-19.

Indikator 2

1. PSBB Hanya Berlaku Jika Mendapat Persetujuan Menteri Kesehatan

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap PSBB hanya berlaku jika mendapat persetujuan menteri kesehatan. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 65% berada pada rentang 33.34% - 66.66% berada pada tingkat “Cukup Baik”. Hal ini dikarenakan Menteri Kesehatan berhak memberi keputusan karena dinilai lebih memahami kondisi dan situasi terkait pandemi ini.

2. PSBB Dapat Meminimalisasi Mobilitas Penduduk Indonesia

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap PSBB dapat meminimalisasi mobilitas penduduk indonesia. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 73% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan PSBB memberikan dampak yang besar terhadap mobilitas penduduk Indonesia.

3. PSBB Sesuai dengan Kultur Dan Karakter Negara Indonesia

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap PSBB sesuai dengan kultur dan karakter negara indonesia. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 47% berada pada rentang 33.34% - 66.66% berada pada tingkat “Cukup Baik”. Hal ini dikarenakan PSBB cenderung hanya cocok diterapkan di perkotaan karena setiap daerah memiliki kultur yang berbeda.

4. PSBB Merupakan Pilihan Rasional Untuk Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap PSBB merupakan pilihan rasional untuk percepatan penanganan covid-19 di indonesia. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 70% berada pada rentang

66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan PSBB merupakan pilihan yang memungkinkan dari semua bentuk penanganan COVID-19.

5. PSBB Harus Didasarkan Pada Pertimbangan Epidemiologis, Besarnya Ancaman, Efektifitas, Dukungan Sumber Daya, Teknis Operasional, Pertimbangan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarkan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 96% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan PSBB tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan segala aspek.

Indikator 3

1. Kriteria Pemberlakuan PSBB Harus Berdasarkan Jumlah Kasus

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarkan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap kriteria pemberlakuan psbb harus berdasarkan jumlah kasus. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 76% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan jumlah kasus berpengaruh besar dalam penyebaran COVID-19 sehingga ini merupakan poin penting dalam pemberlakuan PSBB.

2. Pemberlakuan PSBB Hanya di Zona Merah

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarkan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap pemberlakuan psbb hanya di zona merah. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 74% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan zona merah harus dibatasi agar tidak menyebar ke daerah lain yang masih berstatus zona aman.

3. Pemberlakuan PSBB Tidak Bersifat Menyeluruh

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarkan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap pemberlakuan psbb tidak bersifat menyeluruh. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 50% berada pada rentang 33.34% - 66.66% berada pada tingkat “Cukup Baik”. Hal ini dikarenakan ada kelebihan dan kekurangan jika pemberlakuan PSBB tidak menyeluruh.

Indikator 4

1. Adanya Pembelajaran Online (Metode Daring)

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarkan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap adanya pembelajaran online (metode daring). Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam

persentase 89% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan area sekolah bisa menjadi klaster besar dalam penyebaran COVID-19 sehingga perlu adanya pembelajaran *online*.

2. Penerapan *Work From Home*

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap penerapan *work from home*. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 82% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan *work from home* bisa membantu memutus penyebaran COVID-19.

3. Adanya Pembatasan Hak Individual

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap adanya pembatasan hak individual. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 47% berada pada rentang 33.34% - 66.66% berada pada tingkat “Cukup Baik”. Hal ini dikarenakan tidak semua hak individu harus dibatasi.

4. Adanya Penghentian Interaksi Sosial

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap adanya penghentian interaksi sosial. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 78% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan konsep PSBB adalah penghentian interaksi sosial.

5. Penutupan Tempat Tempat Perbelanjaan (Mall)

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap penutupan tempat tempat perbelanjaan (mall). Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 98% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan interaksi yang melibatkan banyak orang di tempat perbelanjaan bisa menjadi tempat penyebaran COVID-19 sehingga harus ditutup.

6. PSBB Dapat Membatasi Frekuensi dan Jumlah Pertemuan Massal

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap PSBB dapat membatasi frekuensi dan jumlah pertemuan massal. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 89% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan semenjak adanya PSBB masyarakat tidak lagi mengadakan acara yang melibatkan pertemuan massal atau perkumpulan banyak orang.

Indikator 5

1. Setiap Pemimpin Daerah Harus Mengikuti Kebijakan Pusat dan Tidak Membuat Aturan Berbeda

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap setiap pemimpin daerah

harus mengikuti kebijakan pusat dan tidak membuat aturan berbeda. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 72% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan harus ada kebijakan yang menjadi pedoman dalam penanganan COVID-19 yakni kebijakan pusat sehingga pemimpin daerah wajib mengikuti.

2. Dalam PSBB Perlu Adanya Kerjasama Berbagai Pihak

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarkan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap dalam psbb perlu adanya kerjasama berbagai pihak. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 100% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan kerjasama berbagai pihak adalah kunci utama dalam penanganan penyebaran COVID-19, sehingga baik masyarakat maupun pemerintah harus saling bahu membahu.

Indikator 6

1. Pengusulan PSBB Terstruktur dan Sistematis

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarkan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap pengusulan psbb terstruktur dan sistematis. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 95% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan pengusulan PSBB harus terstruktur dan sistematis agar mempermudah Gugus penanganan COVID-19 dan Menteri Kesehatan memberikan izin PSBB.

2. Menteri Menetapkan PSBB dengan Memperhatikan Pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarkan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap menteri menetapkan psbb dengan memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (covid-19). Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 90% berada pada rentang 66.67% - 100% berada pada tingkat “Baik”. Hal ini dikarenakan Menteri Kesehatan tidak akan mampu bekerja sendiri maka dari itu dibutuhkannya pertimbangan Ketua Gugus penanganan COVID-19.

Indikator 7

1. PSBB Bersifat Imbauan

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarkan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap PSBB bersifat imbauan. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 9% berada pada rentang 00.00% - 33.33% berada pada tingkat “Tidak Baik”. Hal ini

dikarenakan PSBB seharusnya menjadi aturan ataupun kebijakan yang tegas agar masyarakat patuh.

2. PSBB Tidak Memuat Sanksi

Berdasarkan jawaban yang didapat dari kuesioner yang disebarakan peneliti kepada 100 mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap PSBB tidak memuat sanksi. Dapat disimpulkan responden yang menjawab setuju dalam persentase 10% berada pada rentang 00.00% - 33.33% berada pada tingkat “Tidak Baik”. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat menganggap remeh PSBB karena tidak adanya sanksi.

Maka dapat diketahui hasil dari penelitian ini yang terdapat dari rekapitulasi Tabel 1 pada perhitungan responden yang menjawab “Setuju” yaitu 71.5%, dimana rentang ini berada pada kategori “Baik” dengan keberadaan pada rentang 66.67% - 100%. Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berada pada tingkat “**Baik**”.

Namun, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 dinilai banyak pihak belum efektif dalam mencegah pergerakan masyarakat. Hal tersebut terjadi di wilayah Kota Pekanbaru, yang telah menerapkan PSBB sejak 17 April 2020. Kenyataannya dilapangan, masyarakat sulit untuk tetap tinggal dirumah. Banyak alasan untuk meninggalkan rumah yakni alasan mulai dari bekerja, pekerja lepas, hingga perusahaan yang tak menerapkan bekerja dari rumah sehingga pergerakan manusia masih tetap tinggi. Kesenjangan antara Das Sein dan Das Sollen merupakan suatu hal yang lazim yang ditemui dalam dunia hukum. Demikian halnya yang terjadi dalam proses penanganan percepatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berada pada kategori “Baik” Hal ini ditunjukkan hasil responden yang menjawab “Setuju” yaitu hasilnya 71.5%, dimana rentang ini berada pada kategori “Baik” dengan keberadaan pada rentang 66.67 - 100%.

Dengan demikian Persepsi Mahasiswa PPKn Universitas Riau terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) adalah “**Baik**”.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Terkait Peraturan Pemerintah diharapkan selanjutnya membuat pijakan kebijakan lebih jelas dan konkrit.
2. PSBB diharapkan ada pemberian sanksi ataupun denda sehingga memberikan efek jera kepada pelanggar aturan.
3. Masyarakat terutama mahasiswa diharapkan lebih menaati aturan dalam penarapan PSBB seperti tidak berkumpul/berkerumun, menggunakan masker, jaga jarak fisik dan terapkan perilaku hidup bersih dimanapun berada, khususnya mencuci tangan dengan sabun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan hormat penulis kepada:

1. Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si, sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
4. Ibu Sri Erlinda, S.Ip, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H selaku Pembimbing II
5. Bapak Dr. Gimin, M.Pd, Bapak Supentri, M.Pd dan Bapak Haryono, M.Pd selaku dosen penguji
6. Bapak Drs. Zahirman, M.H, Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Separen, S.Pd, M.H, Bapak Indra Primahadhani, M.H selaku Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
7. Ayahanda Yuseri Syafri dan Ibunda Kusmawati tercinta..

DAFTAR PUSTAKA

Anas, Sudijono. 2012. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo

Permenkes RI No. 9 Tahun 2020

Riduwan. 2005. Skala Pengukuran Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta

Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Sosial*. Rajawali Press. Jakarta

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Susilo, Aditya dkk. 2020. *Corona Virus Disease 2019*; Tinjauan Literatur Terkini. Jakarta: Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Vol. 7 No.1
- Yuliana. 2020. *Corona Virus Disease (COVID-19)*; Sebuah Tinjauan Literatur. Lampung: Wellness and Healthy Magazine. Vol. II No.1